

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Idealized Policy (Kebijakan Ideal)

Ramainya pembeli dan lokasinya yang strategis membuat para PKL masih bertahan untuk berjualan di eks Pasar Geliting. Untuk itu, Satpol-PP menggunakan pendekatan SIMANIS yaitu Simpatik dan Humanis. Kemudian supaya barang dagangan mereka laku, semua PKL di eks Pasar Geliting harus kompak mau dipindahkan ke Pasar Wairkoja agar proses transaksi jual beli hanya dilakukan di Pasar Wairkoja.

2) Target Groups (Kelompok Sasaran)

Para pedagang kaki lima di eks Pasar Geliting mengatakan bahwa barang dagangan yang mereka jual di Pasar Wairkoja tidak laku karena sepi pembeli dan lokasinya yang kurang strategis yang membuat mereka mengalami kerugian dibandingkan dengan di eks Pasar Geliting yang ramai pembeli dan lokasinya yang strategis yang membuat mereka mendapatkan keuntungan. Kondisi ini membuat warga terganggu akibat keramaian aktifitas di eks Pasar Geliting yang membuat kebisingan dan mengganggu aktifitas pejalan kaki. Selain itu, keberadaan PKL juga membuat kerugian bagi pemilik kios dimana ada PKL yang menjual dagangan di depan kiosnya sehingga menghalangi orang untuk berbelanja di kiosnya. Berbeda dengan warga lainnya tidak merasa terganggu dengan keberadaan PKL di eks Pasar Geliting.

3) Implementing Organization (Organisasi Pelaksana)

Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Sikka tidak lagi melakukan pemantauan terhadap aktivitas di eks Pasar Geliting karena statusnya yang dahulunya sebagai pasar sudah di alih fungsikan ke Pasar Wairkoja. Sehingga Pemerintah daerah Kabupaten Sikka bekerjasama dengan SatPol-PP dan Damkar untuk melakukan penertiban kepada PKL yang melakukan pelanggaran, sehingga semua urusan terkait penertiban PKL di eks Pasar Geliting diserahkan kepada Sat PolPP dan Damkar Kabupaten Sikka mulai dari tindakan penegakan sampai pada pemberian sanksi kepada

PKL yang melakukan pelanggaran. Kemudian, sebelum melaksanakan penertiban di eks Pasar Geliting, Satpol-PP melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Geliting. Dalam setiap penertiban, petugas akan mendatangi dan memberikan teguran serta peringatan langsung kepada setiap PKL yang melanggar.

4) Environmental Factors (Faktor Lingkungan)

Alasan ekonomi yang membuat para PKL tetap bertahan untuk berjualan menggunakan fasilitas umum di wilayah eks Pasar Geliting karena lokasinya yang strategis dan pembelinya juga ramai. Faktor ekonomi juga menghambat pemerintah dalam membangun infrastruktur baru untuk kebutuhan pedagang. Selain itu faktor lainnya yaitu faktor sosial, dimana kurangnya kekompakan yang menyebabkan kerenggangan dalam hubungan satu pedagang dan pedagang lainnya. Hal ini dikarenakan ada pedagang yang sudah mau dipindahkan ke Pasar Wairkoja tetapi ada yang masih berjualan di eks Pasar Geliting.

6.2 Saran

1) Saran untuk Pemerintah

- (a) Pemerintah harus lebih memaksimalkan penyampaian informasi tentang keberadaan Perda Penertiban PKL agar tidak dijumpai PKL yang masih beralasan tidak mengetahui peraturan yang ada.
- (b) Diharapkan pemerintah membangun fasilitas umum berupa air di Pasar Wairkoja.
- (c) Diharapkan pemerintah lebih tegas lagi dalam menertibkan para PKL.
- (d) Diharapkan Pemerintah Daerah juga harus mengkaji kembali terkait lokasi pasar, apakah lokasi tersebut strategis ataukah tidak, mengkaji kembali kebijakan yang dibuat terkait penutupan Pasar Lama Geliting sehingga tidak ada lagi pedagang kaki lima, dan tidak ada keributan antara pedagang kaki lima dengan Pemerintah

2) Saran untuk Pedagang Kaki Lima (PKL)

- (a) Hendaknya PKL menyadari bahwa tempat untuk berdagang yaitu Pasar Wairkoja sehingga PKL harus merelakan untuk dialokasikan sesuai dengan keputusan dan kebijakan pemerintah.
- (b) Para PKL seharusnya melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang agar terciptanya keindahan dan menciptakan rasa nyaman bagi semua pihak.

- (c) Seharusnya para pedagang lebih kompak mau direlokasikan ke Pasar Wairkoja agar tidak menimbulkan perselisihan antara pedagang di Pasar Wairkoja dan eks Pasar Geliting.

DAFTAR PUSTAKA

- Idaqa dan Basri. 2013. *Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Pengaturan Dan Penertiban Usaha Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus:di area Taman Adipura Sumenep.*Jawa Timur: Universitas Wiraraja Sumenep.
- Lilik, Nopa. 2017. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Aloon-Aloon Ponorogo).*Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.
- Bayu Saputra, Rholen. 2014. *Profil Pedagang Kaki Lima (PKL Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan).* Riau: Universitas Riau.
- Alwi, Hasan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik.*Bandung: Alfabeta.
- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.* Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007.*Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi).* Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3.
- Suharno. 2008. *Dasar-Dasar Keijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan).* Yogyakarta: UPT Negeri Yogyakarta.
- Suandi, I Wayan. 2010. *Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Pemerintahan Daerah.* Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana bali. Vol.I No. 01, Tahun 2010.
- Anderson, James E.1984. *Public Policy Making.*New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Dye, Thomas R. 2008. *Understanding Public Policy, 12th Edition.* Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik.*Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Utomo, B. 2006. *Karya Ilmiah Ekologi Benih*. Medan. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Dunn, William. N. 1981. *Public Policy Analysis And Introduction*. USA: Prentice Hall.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media Yogyakarta: Gava Media.
- Weimer, David L dan Vining, Aidan R. 1999. *Policy Analysis: Concept and Practice, third edition, Prectice Hall*. New Jersey.
- Nugroho, R. 2009. *Public policy*. PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Frederickson, H. George, dalam Heady. 2006. *New Public Administration*. University of Alabama Press.
- Nawi, Rusdin, 2018. *Reinventing Government dalam Model Analisis Kebijakan Pelayanan Birokrasi di Indonesia*. Jurnal Universitas Satria Makassar.
- Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 1975. *The Policy Implementation Process: "A Conceptual framework, Administrati*.
- Adi Sulistyo Nugroho. 2016. *E-commerce Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: CEKUILIBRIA.
- Akib, H. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana*. 1(1).
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Teori dan Praktek*. Alfabeta.

- Parsons, Wayne. 2006. *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jakti, Dorodjatun Kuntjoro. 1986. *Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Widodo, Ahmadi. 2000. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha PKL, Studi Kasus Kota Semarang*. Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana, Megister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Danisworo, M. 2000. *“Revitalisasi Kawasan Kota Sebuah Catatan dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota”*. www.urdi.org (urban and regional development institute, 2000).
- Damsar. 2002. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Eddy Soeryanto Soegoto. 2009. *Enterpreneurship, Edisi Pertama*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Lijan, Poltak Sinambela. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kartono, dkk. 1980. *Pedagang Kaki Lima*. Bandung: Universitas Katholik Parahiyangan.
- McGee, T.G and Y.M. Yeung. 1977. *Hawkers in Southeast Asian Cities, Planning for the Bazaar Economy*. Internasional Development Research Centre, Ottawa, Canada.
- Widjajanti, Retno. 2000. *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpanglima Semarang)*. Tesis. Magister Teknik Pembangunan Kota Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Achmadi dan Narbuko. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- J.Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Milles, MB & Hubberman, AM,. 2002.*Analisis Data Kualitatif, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto*. Jakarta: UI Percetakan.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang *Ketertiban Umum*

Website

<https://4suarapembaharuan.wordpress.com/2020/07/09/pasar-geliting-vs-pasar-wairkoja/amp/>

LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN

Fokus	Pertanyaan	Informan
Idealized Policy	Bagaimana cara petugas melakukan pendekatan dengan para PKL agar para PKL mau mengikuti aturan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum dan mau dipindahkan ke Pasar Wairkoja?	Petugas Satpol PP
Implementing Organization	Apa saja persiapan yang dilakukan para petugas pada saat akan menjalankan tugas menertibkan para PKL di eks Pasar Geliting? Apa saja kendala yang di hadapi dalam proses penataan dan penertiban PKL di kawasan eks Pasar Geliting?	
Idealized Policy	Bagaimana pendekatan yang dilakukan untuk mengarahkan masyarakat PKL agar mau dipindahkan ke Pasar Wairkoja?	Petugas Satpol-PP
Target Groups	Apakah masyarakat sudah mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018? Bagaimana pendekatan yang dilakukan petugas terhadap masyarakat PKL di eks Pasar Geliting?	Pedagang Kaki Lima

Environmental Factors	Mengapa masyarakat pedagang kaki lima enggan untuk pindah ke Pasar Wairkoja? Bagaimana fasilitas di Pasar Wairkoja? Apa saja kendala yang dihadapi saat dilaksanakannya proses penertiban di eks Pasar Geliting?	
	Bagaimana sikap petugas dalam melakukan penertiban?	Pedagang Kaki Lima
	Bagaimana kesiapan pedagang kaki lima dalam menjaga kebersihan	Pedagang Kaki Lima
	Faktor apa saja yang membuat masyarakat enggan untuk berpindah jualan ke Pasar Wairkoja? Tanggapan masyarakat mengenai keengganan masyarakat PKL untuk berpindah tempat	Tokoh Masyarakat

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Foto bersama Kepala Satpol-PP dan Damkar



Foto wawancara dengan Bapak Kabid
Penegakkan Perundang-Undangan Daerah

Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima





Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



**Wawancara dengan Pemilik Kios di eks
Pasar Geliting**





UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52. Telp. (0380) 833395, Fax. 831194
Web Site : <http://www.unwira.ac.id> e-mail : info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

Nomor : 171/WM.H5.FISIP/N/VII/2022
Lampiran : 1 (Satu) Proposal
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi NTT
di-
T e m p a t

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Penulisan Skripsi Mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira
dengan judul :

**“ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG
KAKI LIMA (PKL) DI EKS PASAR GELITING KECAMATAN
KEWAPANTE, KABUPATEN SIKKA BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008”:**

Nama : Veronika Imelda Jawa
Nomor Registrasi : 421 18 155
Prodi. : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Katolik Widya Mandira Kupang

Maka bersama ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di atas
dapat diizinkan untuk dapat melakukan penelitian di **Pasar Geliting
Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka.**

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik
diucapkan terima kasih.

Kupang, 11 Juli 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



Drs. Marlanus Kleden, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan
(Gedung B Lantai I, II Kompleks Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmptsp.nttprov.id Email : dpmptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070/2744/DPMTSP.4.3/07/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samuel Halundaka, S.IP., M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Veronika Imelda Jawa
NIM : 42118155
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Instansi/Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG
KAKI LIMA (PKL) DI EKS PASAR GELITING KECAMATAN KEWAPANTE
KABUPATEN SIKKA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2018

Lokasi Penelitian : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM kab. Sikka
(Eks Pasar Gelitng Kec. Kewapante) dan Kantor Satpol-PP Kab Sikka

Waktu Pelaksanaan

- a. Mulai : 25 Juli 2022
- b. Berakhir : 10 Agustus 2022

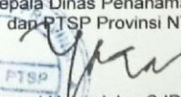
Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 12 Juli 2022

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Plt Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi NTT,


Semuel Halundaka, S.IP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196602261999031002

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JLN. JENDERAL A. YANI – TELP. (0382) 21751 fax. (082) 21655
Maumere

SURAT IZIN
KEPALA BADAN KESBANGPOLWA
KABUPATEN SIKKA
NOMOR : Kesbangpol.070/555/VII/2022
TENTANG
IZIN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN

DASAR : Surat dari Plt. Kadis Penanaman Modal dan PTSP Prop. NTT Nomor :
07/2744/DPMPSTSP.4.3/07/2022, tanggal 12 Juli 2022

MENGIZINKAN

KEPADA : **VERONIKA IMELDA JAWA**
PEKERJAAN : MAHASISWI
KEBANGSAAN : INDONESIA
ALAMAT : Waidoko, RT/RW : 009/002, Kel/Desa : Wolomarang - Kecamatan : Alok Barat – Kab. Sikka
PROGRAM STUDI : Ilmu Administrasi Publik – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Unwira Kupang
UNTUK : Melakukan Penelitian dengan judul " **Analisis Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PLK) di Eks Pasar Geliting Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka Berdasarkan Perda No. 01 Tahun 2018** " "
LOKASI : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Sikka (Eks Pasar Geliting Kec. Kewapante) dan Kantor Satpol PP Kabupaten Sikka
LAMANYA : Terhitung mulai tanggal 25 Juli s/d 10 Agustus 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kepada yang bersangkutan wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai Berikut :

1. Sebelum dan sesudah melakukan kegiatan Penelitian yang bersangkutan harus melaporkan kepada Pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat –istiadat daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil " PENELITIAN " Kepada Bupati Sikka Cq. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 22 Juli 2022

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Sikka,

Drs. SERVASIUS SEWAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199402 1 003

Tembusan:

- Yth. 1. Bupati Sikka di Maumere (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Sikka di Maumere;
3. Kepala Satpol PP Kab. Sikka di Maumere;
4. Camat Alok Timur di Tempat ;
5. Camat Kewapante di Tempat ;
6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwira Kupang di Kupang.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JLN. JENDERAL A. YANI – TELP. (0382) 21751 fax. (082) 21655
Maumere

SURAT KETERANGAN

NOMOR : Kesbangpol.070/233/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. NAMA : GERGORIUS BERO, SH
b. NIP : 196705092000031006
c. JABATAN : KEPALA BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIKKA

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : VERONIKA IMELDA JAWA
KEBANGSAAN : INDONESIA
PEKERJAAN : MAHASISWI
ALAMAT : MAUMERE

Telah Selesai melakukan Penelitian dengan Judul "**Analisis Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Eks Pasar Geliting Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018**" Sesuai surat dari Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. NTT Nomor : 070/2744/DPNT/Sp.4.3/07/2022, tanggal 12 Juli 2022 dan Surat Ijin Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka Nomor : 070/554/VIII/2022 tanggal 21 Juli 2022 serta Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Sikka Nomor : Satpol PP, Damkar.800/168/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 23 Agustus 2022

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Sikka
Pejabat Yang Mewakili.

GERGORIUS BERO, SH
Pembina
NIP. 196705092000031006

Tembusan:

- Yth. 1. Bupati Sikka di Maumere (sebagai laporan) ;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unika di Kupang,